



## **KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN TRANSPARANSI MELALUI SISTEM SATU DATA PETA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**Rosdawiyah<sup>1</sup>, Antasari Bandjar<sup>2</sup>**  
Universitas Pattimura<sup>1,2</sup>  
e-mail: [rosdawiyah18@gmail.com](mailto:rosdawiyah18@gmail.com)

Diterima: 27/4/2026; Direvisi: 16/5/2026; Diterbitkan: 26/5/2026

### **ABSTRAK**

Pengelolaan data publik di Kabupaten Seram Bagian Barat masih menghadapi persoalan fragmentasi data, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan informasi pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan data publik belum sepenuhnya berfungsi sebagai media komunikasi yang transparan dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penguatan komunikasi partisipatif dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta sebagai medium komunikasi publik yang lebih inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *participatory action research (PAR)* melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, *focus group discussion (FGD)*, serta praktik pemetaan bersama masyarakat dan aparaturnya. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi, bentuk partisipasi masyarakat, dan perubahan pengelolaan informasi publik setelah intervensi dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan validasi data, menghasilkan informasi yang lebih kontekstual, serta memperkuat transparansi informasi publik melalui visualisasi peta digital. Sistem satu data berbasis peta juga mempermudah masyarakat memahami kondisi wilayah secara lebih terbuka dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi komunikasi partisipatif dan teknologi pemetaan digital tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola data publik, tetapi juga membentuk ekosistem komunikasi yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

**Kata Kunci :** *Komunikasi Partisipatif, Satu Data, Peta Digital*

### **ABSTRACT**

Public data management in West Seram Regency continues to face challenges related to data fragmentation, limited access to information, and low community involvement in the management of development information. These conditions have prevented public data from fully functioning as a transparent and participatory communication medium. This study aims to analyze the implementation of participatory communication strengthening in the development of a map-based one-data system as a more inclusive public communication medium. The study employed a qualitative approach using a *participatory action research (PAR)* design through the stages of problem identification, planning, implementation, and evaluation. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, *focus group discussions (FGD)*, and collaborative mapping practices involving local communities and regional government officials. The data were analyzed thematically to identify communication patterns, forms of community participation, and changes in public information management following the intervention. The findings indicate that the participatory communication approach increased



community involvement in data collection and validation, produced more contextual information, and strengthened public information transparency through digital map visualization. The map-based one-data system also enabled the public to understand regional conditions more openly and accessibly. This study concludes that the integration of participatory communication and digital mapping technology not only improves the quality of public data governance but also fosters a more collaborative, adaptive, and sustainable communication ecosystem at the local level.

**Keywords:** *Participatory Communication, Single Data System, Digital Mapping*

## PENDAHULUAN

Perkembangan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut tersedianya sistem data publik yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya standardisasi data, interoperabilitas, serta keterbukaan informasi guna mendukung pembangunan yang efektif dan transparan (Pemerintah Indonesia, 2019). Walaupun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis maupun kelembagaan. *United Nations* (2022) dalam *E-Government Survey* edisi ke-12 menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan di negara berkembang masih menghadapi persoalan kapasitas institusional, koordinasi lintas sektor, dan kesenjangan infrastruktur digital. Umasugi (2025) turut menegaskan bahwa fragmentasi data antarinstansi serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia daerah menjadi penghambat utama dalam mewujudkan integrasi data publik yang efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola data publik tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas komunikasi publik dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, pengelolaan data publik masih berlangsung secara sektoral dan belum sepenuhnya terhubung dalam sistem yang terpadu. Setiap perangkat daerah cenderung mengelola data secara mandiri sehingga sering ditemukan ketidaksesuaian informasi antarinstansi yang berdampak terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hasnita dan Salomo (2025) menunjukkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia di daerah masih menghadapi persoalan *sectoral ego*, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang menghambat tata kelola berbasis data. Di sisi lain, masyarakat juga masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi pembangunan secara utuh dan mudah dipahami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas keterbukaan informasi publik dengan praktik tata kelola data di tingkat lokal. OECD (2021) menegaskan bahwa keterbukaan informasi yang efektif tidak cukup hanya melalui penyediaan data, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi informasi yang inklusif, mudah dipahami, dan dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat.

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kapasitas literasi teknologi masyarakat di daerah. Imran (2022) menjelaskan bahwa ketimpangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor struktural yang memperlambat proses transformasi digital berbasis komunitas di negara berkembang. Mesa (2023) menambahkan bahwa rendahnya akses teknologi berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan transparansi publik. Dalam perspektif komunikasi, persoalan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai kendala teknologi semata, melainkan sebagai persoalan relasi komunikasi antara pemerintah dan



masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses informasi secara setara, maka proses partisipasi publik dalam pembangunan menjadi semakin terbatas. Oleh sebab itu, penguatan komunikasi publik menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan sistem satu data di tingkat lokal.

Data publik pada hakikatnya merupakan hasil proses komunikasi sosial yang diproduksi, disebarluaskan, dan dimaknai bersama dalam kehidupan masyarakat. Fuchs (2022) menjelaskan bahwa ketimpangan akses informasi di era kapitalisme digital berpotensi memperluas kesenjangan sosial sekaligus melemahkan partisipasi warga dalam ruang publik. Couldry dan Mejias (2022) juga menegaskan bahwa relasi data yang tidak dibangun secara partisipatif akan menghasilkan informasi yang kurang relevan, sulit dipahami, dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, data publik tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai instrumen administratif pemerintah semata. Sebaliknya, data harus dipahami sebagai medium komunikasi yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan data membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis agar informasi yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai sosial bagi masyarakat.

Pendekatan komunikasi partisipatif menawarkan perspektif yang lebih terbuka dalam memahami pengelolaan data publik. Tufté (2024) menegaskan bahwa komunikasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan melalui dialog horizontal, refleksi kritis, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Subedi dan Karki (2022) yang menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan proses pembangunan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan melalui pertukaran pengetahuan secara setara. Temuan Anani-Bossman dan Blankson (2024) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi berbasis *bottom-up* mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan secara signifikan. Dalam pembangunan sistem satu data, partisipasi masyarakat menjadi penting karena warga memiliki pengetahuan lokal yang dapat memperkuat validitas dan relevansi informasi yang dikumpulkan. Oleh sebab itu, integrasi komunikasi partisipatif dalam pengelolaan data publik menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat selama ini lebih banyak diposisikan sebagai penerima informasi daripada sebagai pihak yang terlibat dalam proses produksi data. Akibatnya, data yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi sosial masyarakat secara aktual. Amin (2022) menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mekanisme komunikasi pemerintah dibandingkan ketidakpedulian warga terhadap pembangunan. Rendahnya keterlibatan tersebut turut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi yang disediakan pemerintah daerah. Nurlinah et al. (2025) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat ketika warga dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan berbasis digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi data publik dan meningkatkan kualitas hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Dalam perspektif ekologi komunikasi, sistem satu data berbasis peta dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem komunikasi digital yang menghubungkan teknologi, manusia, dan lingkungan sosial secara simultan. Madouh dan Kwon (2023) menjelaskan bahwa media digital membentuk pola komunikasi multidireksional yang memungkinkan pertukaran



informasi berlangsung lebih terbuka dan kolaboratif. Laoera dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa perkembangan ekologi media digital di Indonesia telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari model linier menuju interaksi yang lebih partisipatif. Pandangan tersebut diperkuat oleh Cheyunski (2023) yang menegaskan bahwa ekologi media dan komunikasi perubahan memiliki keterkaitan erat dalam membangun sistem komunikasi publik yang lebih terbuka dan kolaboratif. Berdasarkan perspektif tersebut, peta digital tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang dapat mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penyajian informasi dalam bentuk spasial dinilai lebih mudah dipahami dan lebih kontekstual bagi masyarakat lokal.

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Geographic Information System (PGIS)* mampu meningkatkan kualitas data sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Denwood et al. (2022) menjelaskan bahwa pemetaan partisipatif dapat menghasilkan data spasial yang lebih kontekstual karena melibatkan pengetahuan lokal masyarakat dalam proses pengumpulan informasi. Malakar et al. (2025) turut menegaskan bahwa pendekatan *PGIS* efektif dalam mendorong keterlibatan komunitas lokal melalui proses *co-production* pengetahuan berbasis peta. *World Bank* (2021) juga menjelaskan bahwa keterbukaan data pemerintah yang didukung partisipasi warga berkontribusi terhadap peningkatan pengawasan publik dan kualitas pengambilan keputusan pembangunan. Ansari et al. (2022) menemukan bahwa visualisasi data pemerintah terbuka secara signifikan meningkatkan kebergunaan informasi publik bagi masyarakat umum. Namun demikian, pengembangan sistem data di daerah selama ini masih lebih berorientasi pada pendekatan teknokratis yang menitikberatkan aspek administratif dan teknologi semata sehingga dimensi komunikasi partisipatif belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola data publik.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas integrasi basis data, efisiensi administrasi, dan pengembangan sistem informasi geografis dibandingkan dimensi komunikasi partisipatif dalam tata kelola data publik. Bernot et al. (2024) menemukan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan komunikasi dan koordinasi antaraktor kelembagaan. Alexopoulos et al. (2023) turut menjelaskan bahwa kegagalan berbagai inisiatif *open government data* di negara berkembang banyak dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas institusional, partisipasi publik, dan komunikasi antarlembaga. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan komunikasi partisipatif dengan pemetaan digital dalam pengelolaan satu data di tingkat lokal masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi *research gap* utama dalam penelitian ini, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas kajian komunikasi pembangunan melalui integrasi aspek teknologi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka tata kelola data publik yang lebih inklusif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan model komunikasi partisipatif berbasis pemetaan digital dalam pembangunan sistem satu data di Kabupaten Seram Bagian Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan dimensi teknologi dan komunikasi, penelitian ini menempatkan peta digital sebagai medium komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya dialog, kolaborasi, dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi informasi publik sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan data daerah. Selain itu, pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan data sebagai sarana komunikasi pembangunan yang terbuka



dan partisipatif. Melalui pendekatan tersebut, sistem satu data tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai ruang komunikasi sosial yang mendukung pembangunan daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *participatory action research (PAR)* untuk mengkaji proses komunikasi partisipatif dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dinamika komunikasi, pola interaksi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan data publik berbasis digital di tingkat lokal. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap identifikasi dilakukan melalui observasi awal dan diskusi bersama aparatur desa, perangkat daerah, serta masyarakat untuk memetakan kondisi pengelolaan data publik. Tahap perencanaan difokuskan pada penyusunan model sistem satu data berbasis peta dan strategi komunikasi partisipatif, sedangkan tahap implementasi dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan praktik pemetaan bersama masyarakat menggunakan aplikasi *Google My Maps*. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem, tingkat partisipasi masyarakat, serta berbagai hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan.

Subjek penelitian terdiri atas 15 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan data publik di daerah. Informan tersebut meliputi lima aparatur desa, tiga perangkat daerah, dua tokoh masyarakat, dan lima perwakilan masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pemetaan dan pengelolaan informasi wilayah. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan pengalaman, keterlibatan dalam proses pembangunan berbasis data, dan kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan *focus group discussion (FGD)*. Observasi dilakukan selama kegiatan pelatihan dan pemetaan berlangsung untuk mengamati praktik komunikasi dan pengelolaan data di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara individual menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sedangkan *FGD* dilaksanakan dalam dua sesi untuk memfasilitasi dialog antaraktor dalam merumuskan solusi bersama terkait pengembangan sistem satu data berbasis peta.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi, wawancara, dan *FGD* dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti pola komunikasi, bentuk partisipasi masyarakat, dan hambatan pengelolaan data publik. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan visualisasi spasial untuk mempermudah interpretasi hubungan antarfenomena yang ditemukan selama penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan keterkaitan data untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas komunikasi partisipatif dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan *FGD*, serta melakukan *member checking* kepada informan guna memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan, pengelolaan data publik di Kabupaten Seram Bagian Barat masih berlangsung secara sektoral dan belum terhubung dalam sistem yang terintegrasi. Perbedaan data antarperangkat daerah menyebabkan informasi pembangunan sering kali tidak konsisten dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi tersebut juga berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat dan mudah dipahami. Hasil wawancara awal dengan salah satu aparatur desa menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan data antarlembaga. Informan menyampaikan bahwa “data yang ada di kantor desa dan di dinas sering berbeda, sehingga kami sendiri kadang bingung menentukan data mana yang harus digunakan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum adanya sistem data terpadu menjadi hambatan utama dalam penyediaan informasi pembangunan yang akurat dan seragam. Temuan awal tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi partisipatif pada kegiatan pembangunan sistem satu data berbasis peta yang dilaksanakan selama program pendampingan.

Setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan, terjadi perubahan dalam cara aparatur dan masyarakat memahami fungsi data publik. Data tidak lagi dipandang hanya sebagai dokumen administratif, tetapi mulai dimanfaatkan sebagai media komunikasi bersama dalam proses pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan validasi data juga mengalami peningkatan, terutama pada kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan selama program berlangsung. Dari total 15 informan yang terlibat, sebanyak 12 orang atau sekitar 80% menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka terlibat langsung dalam pengelolaan data publik. Masyarakat mulai berperan aktif sebagai penyedia informasi wilayah dengan menyampaikan data mengenai kondisi lingkungan, potensi desa, serta berbagai persoalan lokal yang sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik. Perubahan kondisi pengelolaan data sebelum dan sesudah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perubahan Kondisi Pengelolaan Data Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian**

No Aspek	Sebelum	Sesudah
1 Integrasi Data	Terpisah antarinstansi	Mulai terintegrasi
2 Partisipasi Masyarakat	Rendah	Meningkat (80% informan terlibat aktif)
3 Akses Informasi	Terbatas	Lebih terbuka
4 Pemahaman Data	Rendah	Meningkat signifikan
5 Pemanfaatan Data	Minim	Mulai digunakan dalam pengambilan keputusan

*Sumber: Data primer hasil kegiatan pengabdian, 2025*

Berdasarkan Tabel 1, perubahan paling menonjol terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan lokal. Kegiatan pendampingan mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan validasi data wilayah. Peningkatan pemahaman terhadap fungsi data memperlihatkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan

informasi publik. Selain itu, keterbukaan akses informasi setelah kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa sistem satu data berbasis peta mulai berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang lebih inklusif dan mudah dipahami masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan data publik tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan kolaborasi antaraktor yang terlibat dalam proses pembangunan.

Proses partisipatif yang dilakukan selama kegiatan menghasilkan data yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam kegiatan pemetaan bersama, masyarakat berhasil mengidentifikasi sejumlah lokasi strategis yang sebelumnya belum tercatat dalam data resmi pemerintah daerah. Lokasi tersebut meliputi tiga sumber air bersih, dua lahan pertanian aktif, dan tiga fasilitas umum yang belum terdokumentasi dalam sistem data sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung mampu meningkatkan kelengkapan sekaligus relevansi data yang dihasilkan. Selain memperkuat akurasi informasi, proses pemetaan partisipatif juga memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wilayah.

Hasil identifikasi masalah yang dilakukan secara kolaboratif antara aparat desa, perangkat daerah, dan masyarakat disajikan pada Gambar 1. Proses tersebut dilaksanakan melalui kegiatan *focus group discussion (FGD)* untuk memetakan berbagai persoalan utama dalam pengelolaan data publik di tingkat lokal. Diskusi bersama menghasilkan tiga persoalan mendasar, yaitu belum tersedianya sistem pencatatan data yang terpadu, rendahnya pemahaman aparat terhadap pemanfaatan teknologi digital, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Ketiga persoalan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan strategi komunikasi partisipatif selama kegiatan pendampingan berlangsung. Melalui proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak, kegiatan ini mampu membangun kesepahaman bersama mengenai kebutuhan penguatan sistem data publik berbasis kolaborasi.



**Gambar 1. Proses identifikasi masalah yang dilakukan secara kolaboratif antara**

Berdasarkan Gambar 1, proses identifikasi masalah menunjukkan bahwa komunikasi dialogis memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka terkait pengelolaan data publik. Forum diskusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi, tetapi juga menjadi media pertukaran gagasan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap sistem data yang dikembangkan bersama. Selain itu, proses komunikasi yang berlangsung secara terbuka turut membantu aparat daerah memahami kebutuhan informasi masyarakat secara lebih



kontekstual. Dengan demikian, kegiatan identifikasi masalah menjadi tahapan penting dalam membangun sistem satu data yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.

Implementasi sistem satu data berbasis peta menunjukkan bahwa visualisasi spasial mampu mempermudah masyarakat dalam memahami informasi publik yang sebelumnya sulit dipahami dalam bentuk tabel atau dokumen administratif. Peta digital yang dihasilkan tidak hanya memuat data geografis, tetapi juga informasi sosial dan ekonomi yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Penyajian informasi berbasis peta dinilai lebih komunikatif karena masyarakat dapat melihat secara langsung lokasi permasalahan maupun potensi wilayah secara visual. Salah satu peserta kegiatan menyampaikan bahwa *“kalau menggunakan peta, kami lebih mudah memahami letak masalah di desa tanpa harus membaca banyak angka dan laporan.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa visualisasi spasial memiliki fungsi yang lebih efektif sebagai media komunikasi publik dibandingkan penyajian data konvensional berbentuk teks dan tabel. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan visual berbasis spasial mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan secara lebih praktis dan kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sistem satu data berbasis peta tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengumpulan dan validasi data terbukti mampu meningkatkan relevansi informasi sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan data publik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperhatikan, terutama keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di wilayah terpencil dan keberlanjutan pengelolaan sistem setelah program pendampingan selesai dilaksanakan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem satu data memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari aspek teknologi maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem data publik berbasis partisipatif di tingkat lokal.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan komunikasi partisipatif dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan informasi, tetapi juga mengubah pola relasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat cenderung ditempatkan sebagai penerima informasi pembangunan tanpa keterlibatan aktif dalam proses penyusunan data publik. Setelah pendekatan partisipatif diterapkan, masyarakat mulai terlibat dalam pengumpulan, validasi, dan penyampaian informasi wilayah secara langsung. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pola komunikasi dari model satu arah menuju komunikasi yang lebih dialogis dan kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Subedi dan Karki (2022) yang menegaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan proses sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan melalui pertukaran pengetahuan secara setara. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal pengumpulan data membuat informasi yang dihasilkan lebih memperoleh legitimasi sosial karena dibangun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan nyata masyarakat lokal.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemetaan memperlihatkan bahwa komunikasi yang inklusif mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan kontekstual.



Keterlibatan warga dalam proses identifikasi wilayah memungkinkan munculnya informasi lokal yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem data pemerintah daerah. Data mengenai sumber air bersih, lahan pertanian aktif, dan fasilitas umum yang belum terdokumentasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan spasial yang penting dalam pembangunan sistem informasi daerah. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian de Carvalho et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *participatory geographic information systems (PGIS)* mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat ke dalam sistem informasi spasial sehingga menghasilkan data yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Malakar et al. (2025) juga menegaskan bahwa pendekatan *PGIS* efektif dalam mendorong keterlibatan komunitas lokal melalui mekanisme *co-production* pengetahuan berbasis peta. Oleh sebab itu, proses partisipatif dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan data administratif, tetapi juga membentuk informasi yang lebih sesuai dengan realitas sosial di tingkat lokal.

Selain meningkatkan kualitas data, komunikasi partisipatif juga berkontribusi terhadap penguatan transparansi informasi publik. Sistem satu data berbasis peta yang dikembangkan dalam penelitian ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi pembangunan secara lebih terbuka dan mudah dipahami melalui visualisasi spasial. Penyajian data dalam bentuk peta membantu masyarakat memahami lokasi permasalahan, potensi wilayah, dan kondisi sosial secara lebih cepat dibandingkan melalui laporan tekstual atau tabel statistik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data publik tidak lagi sekadar menjadi instrumen administrasi pemerintah, tetapi telah berkembang sebagai medium komunikasi publik yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini relevan dengan kajian Ansari et al. (2022) yang menjelaskan bahwa visualisasi data pemerintah terbuka secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan kebergunaan informasi publik bagi masyarakat umum. Alexopoulos et al. (2023) juga menegaskan bahwa keterbukaan data pemerintah merupakan prasyarat penting dalam mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik, khususnya pada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan tata kelola digital.

Dalam perspektif ekologi komunikasi, sistem satu data berbasis peta dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem komunikasi digital yang menghubungkan teknologi, pemerintah, dan masyarakat dalam proses pertukaran informasi yang saling memengaruhi. Penggunaan media digital dalam pengelolaan data publik telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari model linier menuju pola komunikasi multidireksional yang lebih terbuka dan interaktif. Laoera dan Wibowo (2023) menjelaskan bahwa perkembangan ekologi media digital mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen dan distributor informasi secara aktif. Pandangan tersebut diperkuat oleh Cheyunki (2023) yang menunjukkan bahwa ekologi media dan komunikasi perubahan memiliki keterkaitan erat dalam membangun sistem komunikasi publik yang lebih partisipatif. Dalam penelitian ini, peta digital terbukti tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis visualisasi data, tetapi juga menjadi ruang komunikasi baru yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan media spasial digital memberikan kontribusi penting dalam memperkuat komunikasi pembangunan di tingkat lokal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan data menciptakan rasa memiliki terhadap informasi yang dihasilkan sehingga masyarakat lebih percaya terhadap data yang disediakan pemerintah daerah. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses validasi data, hubungan



antara pemerintah dan warga menjadi lebih terbuka serta mengurangi kecurigaan terhadap informasi pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transparansi informasi publik tidak hanya bergantung pada keterbukaan akses data, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembentukan informasi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurlinah et al. (2025) yang menemukan bahwa transformasi digital pemerintah daerah mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat melalui penguatan transparansi layanan publik berbasis digital. Nurhidayat et al. (2024) juga menegaskan bahwa peningkatan layanan *e-government* tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa didukung oleh mekanisme komunikasi yang inklusif dan responsif.

Meskipun menunjukkan berbagai capaian positif, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi sistem satu data berbasis peta. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital secara mandiri. Sebagian aparatur desa dan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi pemetaan dan pengelolaan data berbasis digital karena keterbatasan literasi teknologi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah juga memengaruhi keberlanjutan penggunaan sistem setelah kegiatan pendampingan selesai dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesenjangan akses teknologi dan kemampuan digital masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas digital menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberlanjutan sistem data berbasis partisipatif di daerah.

Tantangan kesenjangan digital tersebut sejalan dengan hasil penelitian Akbar dan Wijaya (2024) yang menemukan bahwa literasi digital masyarakat pedesaan di Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah, khususnya pada aspek keterampilan penggunaan teknologi digital. Afrina et al. (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi transformasi digital berbasis komunitas, terutama pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan tersebut terlihat dari masih perlunya pendampingan teknis bagi aparatur desa dan masyarakat dalam mengoperasikan sistem pemetaan digital secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sistem satu data tidak cukup hanya melalui penyediaan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan kompetensi digital masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola data publik berbasis digital di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi komunikasi partisipatif dan teknologi pemetaan digital merupakan pendekatan yang efektif dalam mendukung transparansi informasi publik dan penguatan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan peta digital tidak hanya sebagai instrumen teknis pengelolaan data, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang mampu mendorong dialog, kolaborasi, dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sistem satu data akan lebih efektif ketika masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses produksi dan distribusi informasi publik. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem satu data di Kabupaten Seram Bagian Barat, penelitian ini juga memperkaya kajian komunikasi pembangunan, komunikasi digital, dan ekologi komunikasi dalam konteks transformasi digital di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola



data publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi partisipatif yang dibangun secara berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi komunikasi partisipatif dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta mampu memperkuat transparansi informasi publik sekaligus mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pengelolaan data, tetapi juga menjadi medium komunikasi publik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan informasi pembangunan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa data publik pada dasarnya merupakan hasil dari proses komunikasi sosial yang dibangun melalui interaksi, dialog, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif mampu menghasilkan informasi yang lebih kontekstual, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, pemanfaatan peta digital sebagai media komunikasi publik turut memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui penyajian informasi yang lebih terbuka dan aksesibel.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi pembangunan dengan menegaskan bahwa pendekatan *participatory action research (PAR)* berbasis teknologi pemetaan digital dapat menjadi model alternatif dalam tata kelola informasi publik di daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya memisahkan aspek komunikasi dan teknologi, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi keduanya mampu membentuk sistem informasi yang lebih partisipatif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan peta digital tidak hanya sebagai alat visualisasi data, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya dialog, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian komunikasi digital dan komunikasi pembangunan, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai pemanfaatan teknologi spasial dalam mendukung partisipasi publik di tingkat lokal. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi partisipatif yang dibangun secara berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat keberlanjutan sistem satu data berbasis peta melalui peningkatan kapasitas literasi digital aparatur desa dan masyarakat secara berkala, penyusunan regulasi pembaruan data publik berbasis spasial, serta pembentukan unit pengelola data di tingkat kecamatan sebagai penghubung antarwilayah. Langkah tersebut penting dilakukan agar sistem yang telah dibangun tidak berhenti pada tahap pendampingan, tetapi dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas sistem satu data berbasis peta dalam mendukung kualitas kebijakan publik, mengukur keberlanjutan pengelolaan sistem pascaintervensi, serta menganalisis pengaruh program literasi digital terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola informasi publik pada wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Pengembangan kajian tersebut penting dilakukan untuk memperluas penerapan model komunikasi partisipatif berbasis teknologi digital dalam mendukung transparansi dan pembangunan daerah yang lebih inklusif.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila. (2024). The low level of digital literacy in Indonesia: An analysis of online media content. *Record and Library Journal*, 10(2), 374–387. <https://doi.org/10.20473/rlj.V10-I2.2024.374-387>
- Akbar, M., & Wijaya, G. (2024). Digital literacy of rural areas in Indonesia: Challenges and opportunities. *Proceedings of the 4th International Conference on Rural Socio-Economic Transformation (RUSET 2023)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2023.2344347>
- Alexopoulos, C., Saxena, S., Janssen, M., Rizun, N., Lnenicka, M., & Matheus, R. (2023). Why do Open Government Data initiatives fail in developing countries? A root cause analysis of the most prevalent barriers and problems. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 90(2), e12297. <https://doi.org/10.1002/isd2.12297>
- Amin, M. A. S. (2022). The role of communications in improving community participation in development. *International Journal of Health Sciences*, 6(S1), 4385–4394. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS1.5888>
- Anani-Bossman, A., & Blankson, I. A. (2024). Participatory communication for sustainable development: A study of the Access Project in Ghana. In T. Mmutle et al. (Eds.), *Strategic communication management for development and social change*. Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-41401-5\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41401-5_3)
- Ansari, B., Barati, M., & Martin, E. G. (2022). Enhancing the usability and usefulness of open government data: A comprehensive review of the state of open government data visualization research. *Government Information Quarterly*, 39(1), Article 101657. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101657>
- Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W. C., Verhelst, T., & Tiwari, M. (2024). Institutional dimensions in open government data: A deep dive into Indonesia's Satu Data Initiative and its implications for developing countries. *Public Performance & Management Review*, 47(6). <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>
- Cheyunski, F. (2023). Media ecology and change communication: Similarities, differences and opportunities for real-world synergies. *Explorations in Media Ecology*, 22(1), 15–31. [https://doi.org/10.1386/eme\\_00148\\_1](https://doi.org/10.1386/eme_00148_1)
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2022). Data colonialism: Rethinking Big Data's relation to the contemporary subject. *Questions de communication*, 42(2), 205-221. <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.29845>
- de Carvalho, C. M., Luiz Giatti, L., Fagerholm, N., Bedran-Martins, A. M., & Kytta, M. (2021). Participatory Geographic Information Systems (PGIS) to assess water, energy and food availability in a vulnerable community in Guarulhos (Brazil). *International Journal of Urban Sustainable Development*, 13(3), 516-529. <https://doi.org/10.1080/19463138.2021.2019041>
- Denwood, T., Huck, J. J., & Lindley, S. (2022). Participatory mapping: A systematic review and open science framework for future research. *Annals of the American Association of Geographers*, 112(8), 2324–2343. <https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2065964>
- Fuchs, C. (2022). *Digital capitalism: Media, communication and society volume three*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003222149>



- Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy learning of One Data Indonesia for supporting data-driven policy. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025>
- Imran, A. (2022). Why addressing digital inequality should be a priority. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 89(3), e12255. <https://doi.org/10.1002/isd2.12255>
- Laoera, B., & Wibowo, T. O. (2023). Indonesian online news and digital culture: a media ecology perspective. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i2.6190>
- Madouh, M., & Kwon, K. H. (2023). Evolving in the shadows: A media ecology study of dark web social networks. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 101(2), 1–22. <https://doi.org/10.1177/01968599231210776>
- Malakar, K. D., Roy, S., & Kumar, M. (2025). Participatory GIS: A solution to traditional GIS challenges. In K. D. Malakar, S. Roy, & M. Kumar (Eds.), *Geospatial technologies in coastal ecologies monitoring and management. Advances in Geographic Information Science*. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-92017-2\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-92017-2_9)
- Mesa, D. (2023). Digital divide, e-government and trust in public service: The key role of education. *Frontiers in Sociology*, 8, 1140416. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1140416>
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: Analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 481–498. <https://doaj.org/article/82e6bc0271ff4c4c8b6db894c5255a9a>
- Nurlinah, Ansar, M. C., & Chowdhury, K. (2025). Impact of government digital transformation on citizen trust and participation: Evidence from Gowa Regency, Indonesia. *Frontiers in Human Dynamics*, 7, Article 1700582. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1700582>
- OECD. (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Subedi, A. P., & Karki, T. (2022). Participatory communication for development and social change. *Socio Economy and Policy Studies*, 2(2), 57–60. <https://doi.org/10.26480/SEPS.02.2022.57.60>
- Tufte, T. (2024). Unlearning communication for social change: A pedagogical proposition. *Social Sciences*, 13(7), 335. <https://doi.org/10.3390/socsci13070335>
- Umasugi, M. (2025). Bureaucratic reform and public policy dynamics: Evaluation study of One Data Indonesia program. *International Journal of Community Service*, 4(1), 01–21. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v4i1.1279>
- United Nations. (2022). *E-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- World Bank. (2021). *Open data for sustainable development*. World Bank Publications.